CASCADING DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

VISI BUPATI PESISIR SELATAN :
MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL

MISI BUPATI PESISIR SELATAN :
1. MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TRANSPARAN;
2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN MASYARAKAT ;
3. MENINGKATKAN KONDISI MASYARAKAT YANG AMAN, TENTERAM DAN DINAMIS;
4. MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT YANG MENGARAH KEPADA TUJUAN WISATA YANG NYAMAN DAN BERKESAN;
5. MEWUJUDKAN PENGINDRAAN YANG BERKEALITAS UNTUK MENGANALISA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN, KREATIF DAN BERDAYA SAING;
6. MEWUJUDKAN KONDISI MASYARAKAT YANG AMAN, TENTERAM DAN DINAMIS;

TUJUAN DINAS :
MENINGKATKAN KUALITAS PEMERINTAHAN NAGARI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN SERTA KELUARGA BERKUALITAS

SASARAN 1 :
MENINGKATNYA NAGARI MANDIRI — MISI I

Crosscutting :
BAPPEDALITBANG, KOMINFO, DPMPTSP, DISDUKCAPIL, DISDIKBUD, DINKOS, BPBD, PUTR, PERDAGMTAN, PERTANIAN, PERIKANAN & PERINDAGTRANS

INDIKATOR SASARAN 1 :
1. PERSENTASE NAGARI MANDIRI

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAHAN NAGARI — MISI I
1. PERSENTASE PEMERINTAHAN NAGARI YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INFORMASI
2. PERSENTASE PEMERINTAHAN NAGARI YANG MENETAPKAN SOP PELAYANAN
3. JUMLAH NAGARI YANG DIFASILITASI PERSIAPAN PEMEKARAN

Crosscutting : Kominfo

MENINGKATNYA MANAJEMEN APARATUR PEMERINTAHAN NAGARI
1. JUMLAH APARATUR PEMERINTAHAN NAGARI YANG MENGIKUTI BIMTEK/DIKLAT/PELATIHAN
2. JUMLAH NAGARI YANG MELAKSANAKAN PILWANA

MENINGKATNYA PEMERINTAHAN NAGARI YANG MENGELOLA KEUANGAN NAGARI SESUAI ATURAN YANG BERLAKU
1. PERSENTASE NAGARI YANG MENYUSUN APB NAGARI TEPAT WAKTU

Crosscutting : BPKAD & Inspektorat

MENINGKATNYA PENGELOLAAN ASET
PERSENTASE PEMERINTAHAN NAGARI YANG MEMILIKI DOKUMEN PENGELOLAAN ASET LENGKAP

Crosscutting : BPKAD & Inspektorat

MENINGKATNYA NAGARI YANG MEMILIKI PETA BATAS NAGARI
JUMLAH NAGARI YANG MEMILIKI PETA BATAS NAGARI

MENINGKATNYA FASILITASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI — MISI I
1. PERSENTASE PEMERINTAHAN NAGARI MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TEPAT WAKTU
2. JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI TERLIBAT DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI DAN LEMBAGA ADAT NAGARI
1. JUMLAH ANGGOTA LEMBAGA ADAT YANG MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMBINGAN ADAT DAN LEMBAGA ADAT
2. JUMLAH ANGGOTA LPMN YANG MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMBINGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT LAINNYA (KARANG TARUNA, KAN)
3. JUMLAH ANGGOTA PKK YANG MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMBINGAN TEKNIS
4. JUMLAH PENGELOLA POSYANDU DAN POSYANDU TERINTEGRASI YANG MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMBINGAN TEKNIS
5. JUMLAH DOKUMEN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG TERINVENTARISASI DAN TERIDENTIFIKASI

FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
1. JUMLAH KELEMBAGAAN PKK YANG AKTIF DAN DAPAT MELAKSANAKAN FUNGSI POKJA PKK
2. JUMLAH KELEMBAGAAN POSYANDU DAN POSYANDU TERINTEGRASI YANG AKTIF

MENINGKATNYA PERAN SERTA DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT
1. JUMLAH MASYARAKAT YANG MENGIKUTI GOTONG ROYONG
2. JUMLAH MASYARAKAT YANG MENGIKUTI FORUM MUSYAWARAH NAGARI

MENINGKATNYA KOMPETENSI NAGARI
1. JUMLAH NAGARI YANG MENGIKUTI AJANG HERPRESTASI/LOMBA NAGARI
2. JUMLAH NAGARI YANG MENYUSUN PROFIL DESA

MENINGKATNYA USAHA EKONOMI MASYARAKAT NAGARI DAN PENDAPATAN ASLI NAGARI (PAN) — MISI I dan MISI III
1. PERSENTASE KELEMBAGAAN EKONOMI MASYARAKAT YANG AKTIF
FOMULA 1. : JUMLAH LEMBAGA EKONOMI YANG AKTIF / JUMLAH LEMBAGA EKONOMI X 100%
2. PERSENTASE PENINGKATAN NAGARI YANG MEMILIKI PENDAPATAN ASLI NAGARI (PAN)

MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJASAMA ANTAR DESA
JUMLAH PENGURUS BUMNAG DAN KP SPAMS YANG MENGIKUTI PELATIHAN / BIMTEK

MENINGKATNYA PENGELOLAAN USAHA EKONOMI NAGARI / MENINGKATNYA PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN NAGARI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI NAGARI
1. JUMLAH PENGURUS UEM YANG MENGIKUTI PELATIHAN
2. JUMLAH PENGURUS UPK YANG MENGIKUTI PELATIHAN
3. JUMLAH NAGARI YANG MEMILIKI PENDAPATAN ASLI NAGARI

MENINGKATNYA KERJASAMA ANTAR NAGARI
1. JUMLAH KERJASAMA YANG DISEPAKATI
2. . JUMLAH KAWASAN PERDESAAN YANG TERBENTUK

SASARAN 2 :
TERWUJUDNYA KELUARGA BAHAGIA — MISI 6

Crosscutting :
DINKES, BSUD & DISDUKCAPIL

INDIKATOR SASARAN 2 :
INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA

MENINGKATNYA KEPESERTAAN PUS YANG MENGGUNAKAN KONTRASEPSI
PERSENTASE PUS YANG BER-KB

MENURUNNYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK — MISI 6
MENURUNNYA PERSENTASE ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH PUS

MENINGKATNYA KEAKTIFAN KELOMPOK KEGIATAN (POKTAN)
JUMLAH KELOMPOK KEGIATAN YANG AKTIF

MENINGKATNYA PENYULUHAN IBU BALITA
JUMLAH PENYULUHAN YANG DILAKUKAN

MENINGKATKAN POLA ASUH DAN TUMBUH KEMBANG ANAK
JUMLAH ANAK YANG DIPANTAU TUMBUH KEMBANGNYA

MENINGKATKAN PELAYANAN INTERNAL DPMDPPP&KB
TINGKAT KEPUASAN PEGAWAI TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT

MENINGKATKAN FASILITAS LAYANAN UMUM DPMDPPP&KB
1.PERSENTASE LAYANAN UMUM DPMDPPP&KB
2. PERSENTASE KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG BAIK

MENINGKATKAN KUALITAS SDM DPMDPPP&KB
1. PERSENTASE PEMENUHAN ASN DPMDPPP&KB
2. PERSENTASE ASN HADIR TEPAT WAKTU
3. PERSENTASE PENGURUSAN KGB ASN TEPAT WAKTU

MENINGKATKANNYA KUALITAS PERENCANAAN DPMDPPP&KB
PERSENTASE SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BENSA DPMDPPP&KB YANG SELARAS DENGAN RENSTRA

MENINGKATNYA REALISASI KEUANGAN DPMDPPP&KB
PERSENTASE REALISASI KEUANGAN TERHADAP ALIRAN KAS

MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DPMDPPP&KB
PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DPMDPPP&KB

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DPMDPPP&KB
HASIL PENILAIAN AKIP OLEH INSPEKTORAT

MENINGKATNYA REATA-RATA USIA PERKAWINAN PERTAMA
PERSENTASE PERKAWINAN PERTAMA DIATAS 20 TAHUN

MENINGKATKAN LAYANAN KONSELING
JUMLAH PUSAT KONSELING

MENINGKATKAN PELAYANAN KB
1. JUMLAH AKSEPTOR KB BARU
2. JUMLAH MITRA BANGGA KENCANA

MENINGKATKAN KUALITAS FASKES PELAYANAN KB
1. JUMLAH KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA FASKES
2. JUMLAH NAKES YANG MENGIKUTI PELATIHAN TEKNIS

MENINGKATKAN PELAYANAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB
JUMLAH KEGIATAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB

MENINGKATNYA PENYULIHAN KB
1. JUMLAH PENYULIH KB, PPKBD DAN SUB PPKBD
2. JUMLAH PENYULIHAN KB

PROGRAM	:	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
KEGIATAN	:	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
SUB KEGIATAN	:	1. FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
		2. FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
		3. PEMBINAAN PENINGKATAN SAPARTA/SARANA/PRASARANA PEMERINTAH DESA
		4. FASILITASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
		5. FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

PROGRAM	:	PENINGKATAN KERJASAMA DESA
KEGIATAN	:	FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA
SUB KEGIATAN	:	1. FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM KABUPATEN/KOTA

PROGRAM	:	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
KEGIATAN	:	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
SUB KEGIATAN	:	1. PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJASAMA ANTAR DESA

PROGRAM	:	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KEGIATAN	:	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	1. FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA

PROGRAM	:	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KEGIATAN	:	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	1. IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT
		2. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		3. FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
		4. FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

PROGRAM	:	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
KEGIATAN	:	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
SUB KEGIATAN	:	1. FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
		2. FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA
		3. FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA LOMBA DESA DAN KELURAHAN

PROGRAM	:	PENGENDALIAN PENDUDUK
KEGIATAN	:	PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	1. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA
		2. PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB

PROGRAM	:	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
KEGIATAN	:	PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL
SUB KEGIATAN	:	1. ADVOKASI PROGRAM KKBPK KEPADA STAKEHOLDERS DAN TIM KERJA
		2. KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PROGRAM KKBPK SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL
		3. PROMOSI DAN KIE PROGRAM KBPK MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG
		4. PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM KKBPK MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MNILOK)
		5. PENGELOLAAN GUDANG/SARANA DAN SARANA DI BALAI PENYULIHAN KKBPK
		6. PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK

KEGIATAN	:	PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULIH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)
SUB KEGIATAN	:	1. PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)

KEGIATAN	:	PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	1. PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA
		2. PENINGKATAN KESERTAAN PENGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)

KEGIATAN	:	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB
SUB KEGIATAN	:	1. PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM KKBPK DI KAMPUNG KB
		2. PEMBINAAN TERPADU KAMPUNG KB

PROGRAM	:	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
KEGIATAN	:	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
SUB KEGIATAN	:	1. PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)
		2. PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)

TUJUAN

INDIKATOR	KONDISI 2020	KONDISI 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
1. MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT :							
A. JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN TPK	-	-	15.411	22.622	30.800	39.211	58.523
B. JUMLAH LAPORAN KONVERGENSI STUNTING YANG DISAMPAIKAN NAGARI	182	182	182	182	182	182	182
2. MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN :							
PERSENTASE ANGGARAN YANG DIVALIDASIKAN KEPADA PENERIMA KPM BLT	-	-	10%	12%	15%	17,5%	20%
3. PESISIR SELATAN MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA FAVORIT DI PANTAI BARAT INDONESIA :							
JUMLAH NAGARI YANG DITETAPKAN SEBAGAI DESA WISATA	12	14	16	20	25	30	35
4. BERKEMBANGNYA EKONOMI KREATIF :							
JUMLAH NAGARI YANG MENGANGGARKAN UNTUK MENDUKUNG USAHA EKONOMI KREATIF	-	-	25	30	50	75	100
5. MENINGKATKAN LITERASI MASYARAKAT :							
JUMLAH PUSTAKA NAGARI YANG AKTIF	15	20	50	55	60	70	75
6. MENINGKATNYA PENGUMBARAN NILAI-NILAI AGAMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT :							
PERSENTASE ANGGARAN DANA DESA UNTUK KEGIATAN KEAGAMAAN	2%	5%	7%	10%	12,5%	18%	20%
7. TERWUJUDNYA KELUARGA BAHAGIA :							
A. JUMLAH KK YANG DIBANGUN JAMBAN SEHAT DARI DANA NAGARI	-	20	50	180	150	130	100
B. PERSENTASE PUS YANG MENGGUNAKAN KONTRASEPSI BER-KB	59,46%	59,07%	60,01%	61,12%	61,47%	62,14%	62,89%
C. INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA	53,16%	53,24%	54,24%	54,31%	54,36%	54,51%	54,53%
8. MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAN MENJAGA LINGKUNGAN SECARA MANDIRI :							
JUMLAH MASYARAKAT YANG BERPARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN BHGRM	6370	7280	8190	9100	10010	10920	12740
9. MENINGKATNYA KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN :							
PEMNGKATAN NILAI SAKIP PADA KOMPONEN PERENCANAAN KINERJA	-	A	A	A	A	A	A
10. MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN :							
LEVEL MATURITAS SPIP	-	3 (3,0)	3 (3,0)	3 (3,0)	3 (3,1)	3 (3,1)	3 (3,2)
11. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH :							
OPINI BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12. MENINGKATNYA PERAN KELITBANGAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH :							
PERSENTASE KAJIAN KELITBANGAN YANG DIHASILKAN TERHADAP KEBUTUHAN	-	-	75%	80%	85%	90%	95%
13. MENINGKATNYA DAYA SAING ASN :							
INDEKS PROFESIONALITAS ASN	-	48,78%	50%	52%	54%	56%	58%

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR	KONDISI 2020	KONDISI 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
1. PERSENTASE NAGARI MANDIRI	3,85	4,95	6,04	12,64	15,38	18,13	20,88
2. PERSENTASE NAGARI YANG MEMILIKI PENDAPATAN ASLI NAGARI (PAN)	1,10	1,65	2,75	3,85	5,49	6,59	8,24
3. INOVASI DINAS : PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN NAGARI	1	1	1	1	1	1	1
INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA	53,16%	53,24%	54,24%	54,31%	54,36%	54,51%	54,53%

INTERMEDIATE OUT COME

INDIKATOR	KONDISI 2020	KONDISI 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
1. PERSENTASE PEMERINTAHAN NAGARI MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	0	1	5	10	15	25
2. PERSENTASE PEMERINTAHAN NAGARI YANG MENETAPKAN SOP PELAYANAN	70	75	80	85	90	95	100
3. JUMLAH NAGARI YANG DIFASILITASI PERSIAPAN PEMEKARAN	0	0	2	2	2	2	1
4. PERSENTASE PEMERINTAHAN NAGARI MEMENUHI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TEPAT WAKTU	1,65	2,20	7,14	16,48	41,21	82,42	100
5. JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI TERLIBAT DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI	1264	1269	1269	1269	1269	1269	1269
6. PERSENTASE KELEMBAGAAN EKONOMI MASYARAKAT YANG AKTIF	4,19	4,84	6,45	7,10	7,74	9,35	11,29
7. PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI NAGARI (PAN)	2,20	2,20	2,75	3,85	4,95	7,69	10,44
8. PERSENTASE PUS YANG BER-KB	59,46%	59,07%	60,01%	61,12%	61,47%	62,14%	62,89%
9. MENURUNNYA PERSENTASE ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH PUS	2,03	2,03	2,02	2,00	2,79	2,79	2,78
10. HASIL PENILAIAN AKIP OLEH INSPEKTORAT	A	A	A	A	A	A	A

OUTPUT

INDIKATOR	KONDISI 2020	KONDISI 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
1. JUMLAH APARATUR PEMERINTAHAN NAGARI YANG MENGIKUTI BIMTEK/DIKLAT/PELATIHAN	25	30	31	35	40	45	50
2. JUMLAH NAGARI YANG MELAKSANAKAN PILWANA	0	31	0	151	0	0	0
3. PERSENTASE NAGARI YANG MENYUSUN APB NAGARI TEPAT WAKTU	40	42	45	47	50	57	65
4. PERSENTASE PEMERINTAHAN NAGARI YANG MEMILIKI DOKUMEN PENGELOLAAN ASET LENGKAP	-	-	-	-	85	90	95
5. JUMLAH NAGARI YANG MEMILIKI PETA BATAS NAGARI	41	99	150	182	182	182	182
6. JUMLAH ANGGOTA LEMBAGA ADAT YANG MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMBINGAN ADAT DAN LEMBAGA ADAT	35	35	36	37	37	37	37
7. JUMLAH ANGGOTA LPMN YANG MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMBINGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT LAINNYA (KARANG TARUNA, KAN)	-	-	-	182	264	546	728
8. JUMLAH ANGGOTA PKK YANG MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMBINGAN TEKNIS	-	370	150	400	575	750	925
9. JUMLAH PENGELOLA POSYANDU DAN POSYANDU TERINTEGRASI YANG MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMBINGAN TEKNIS	674	670	670	670	670	670	670
10. JUMLAH DOKUMEN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG TERINVENTARISASI DAN TERIDENTIFIKASI	31	31	31	37	37	112	148
11. JUMLAH KELEMBAGAAN PKK YANG AKTIF DAN DAPAT DAPAT MELAKSANAKAN FUNGSI POKJA PKK	15	15	15	15	15	15	15
12. JUMLAH KELEMBAGAAN POSYANDU DAN POSYANDU TERINTEGRASI YANG AKTIF	-	-	-	119	670	670	670
13. PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENGIKUTI GOTONG ROYONG	-	-	75	80	85	95	100
14. PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENGIKUTI FORUM MUSYAWARAH NAGARI	-	-	75	80	85	95	100
15. JUMLAH NAGARI YANG MENGIKUTI AJANG HERPRESTASI/LOMBA NAGARI	1	2	4	6	6	8	10
16. JUMLAH NAGARI YANG MENYUSUN PROFIL DESA	182	182	182	182	182	182	182
17. JUMLAH PENGURUS BUMNAG DAN KP-SPAMS YANG MENGIKUTI PELATIHAN/BIMTEK	80	80	95	110	120	120	120
23. JUMLAH PENGURUS UEM YANG MENGIKUTI PELATIHAN	0	30	30	30	30	30	30
24. JUMLAH PENGURUS UPK YANG MENGIKUTI PELATIHAN	40	40	40	60	60	60	60
22. JUMLAH NAGARI YANG MEMILIKI PENDAPATAN ASLI NAGARI	-	2	5	7	9	10	12
29. JUMLAH KERJASAMA YANG DISEPAKATI	27	28	29	30	31	32	34
25. JUMLAH KAWASAN PERDESAAN YANG TERBENTUK	4	4	5	7	8	9	10
30. JUMLAH AKSEPTOR KB BARU	7393	8121	8904	9234	9564	9974	10020
35. JUMLAH MITRA BANGGA KENCANA	21	21	23	23	25	25	27
31. JUMLAH KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA FASKES	5	6	7	7	8	8	8
32. JUMLAH NAKES YANG MENGIKUTI PELATIHAN TEKNIS	8	8	8	8	8	8	8
37. JUMLAH KEGIATAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB	15	15	23	30	37	44	51
33. JUMLAH PENYULIH KB, PPKBD DAN SUB PPKBD	49	91	91	91	91	91	91
34. JUMLAH PENYULIHAN KB	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648
38. PERSENTASE PERKAWINAN PERTAMA DIATAS 20 TAHUN	9,1	9,1	9,2	9,2	9,4	9,4	9,60
39. JUMLAH PUSAT KONSELING	47	49	52	54	56	58	60
40. JUMLAH KELOMPOK KEGIATAN YANG AKTIF	0	40	40	40	40	40	40
41. JUMLAH PENYULIHAN YANG DILAKUKAN	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648
42. JUMLAH ANAK YANG DIPANTAU TUMBUH KEMBANGNYA	11.065	11.085	11.125	11.145	11.165	11.165	11.185
43. TINGKAT KEPUASAN PEGAWAI TERHADAP PELAYANAN SEKRTERIATAT	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
44. PERSENTASE LAYANAN UMUM DPMDPPP&KB	90	91	92	94	96	98	100
45. PERSENTASE KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG BAIK	75	75	75	75	75	75	75
46. PERSENTASE PEMENUHAN ASN DPMDPPP&KB	90	91	92	94	96	98	100
47. PERSENTASE ASN HADIR TEPAT WAKTU	95	95	95	95	95	95	95
48. PERSENTASE PENGURUSAN KGB ASN TEPAT WAKTU	95	95	95	95	95	95	95
49. PERSENTASE SASARAN, PROG DAN KEGIATAN BENSA DPMDPPP&KB YANG SELARAS DENGAN RENSTRA	90	91	92	94	96	98	100
50. PERSENTASE REALISASI KEUANGAN TERHADAP ALIRAN KAS	100	100	100	100	100	100	100
51. PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DPMDPPP&KB	94	95	96	97	98	99	100

Painan, 10 Maret 2023
KEPALA DINAS,

Drs. ZULKARNAIN
NIP. 19630313 199303 1 003